



ALIRAN EKONOMI NEOLIBERALISME: SUATU PENGANTAR

Rika Dwi Ayu Parmitasari*¹, Zulfahmi Alwi²

¹, UIN Alauddin Makassar

², UIN Alauddin Makassar

ABSTRAK

Neoliberalisme merupakan aliran ekonomi yang masih dipengaruhi oleh pandangan dan merupakan kelanjutan dari liberalism klasik. Neoliberalisme masih mengusung pandangan bahwa perekonomian harus dijalankan secara bebas dengan mengurangi intervensi dari pemerintah. Secara tidak langsung, maka aliran neoliberalisme mempunyai prioritas pada pasar bebas dan perdagangan bebas, menurunkan hambatan perdagangan internasional dan investasi sehingga masyarakat dapat meningkatkan kualitas kehidupan dengan terwujudnya efisiensi perdagangan dan investasi. Artikel ini juga memberikan pengantar pengetahuan tentang aliran neoliberalisme yang dimulai dari sejarah neoliberalisme, pengertian neoliberalisme, sifat neoliberalisme dan dampak neoliberalisme. Artikel ini memberikan gambaran tentang neoliberalisme dengan memberikan alur informasi mendalam mengenai karakteristik neoliberalisme.

Kata kunci: neoliberalisme, pasar bebas, intervensi pemerintah, ekonomi.

ABSTRACT

Neoliberalism is an economic stream that is still influenced by views and is a continuation of classical liberalism. Neoliberalism still carries the view that the economy must run freely by reducing intervention from the government. Indirectly, the flow of neoliberalism has a priority on free markets and free trade, reducing barriers to international trade and investment so that people can improve the quality of life by realizing trade and investment efficiency. This article also provides an introduction to knowledge about the flow of neoliberalism starting from the history of neoliberalism, the notion of neoliberalism, the nature of neoliberalism and the impact of neoliberalism. This article provides an overview of neoliberalism by providing an in-depth flow of information on the characteristics of neoliberalism.

Keywords: neoliberalism, free market, government intervention, economy.



PENDAHULUAN

Neoliberalisme adalah contoh pertama praktek ekonomi politik yang mengusung bahwa manusia dapat menjadi yang terbaik dengan memberikan kebebasan pada *individual entrepreneurial* dan keahlian dalam kerangka institusional yang mempunyai karakter *private property rights* yang kuat, *free markets* dan *free trade* (Harvey, 2007). Peran dari negara adalah untuk menciptakan dan menjaga kerangka institusional yang pantas untuk praktek tersebut. Negara tidak mempunyai jaminan misalnya untuk kualitas dan integritas uang. Jika pasar tidak mencakup bidang seperti tanah, air, pendidikan, layanan kesehatan, jaminan sosial atau polusi lingkungan, maka itu harus diciptakan oleh negara jika diperlukan. Akan tetapi diluar itu, negara tidak harus mengambil resiko. Intervensi negara dalam pasar ketika diciptakan harus dibuat dalam minimum. Berdasarkan teori neoliberalisme negara tidak akan mempunyai informasi yang cukup untuk memprediksi signal pasar atau harga dan kelompok kepentingan yang kuat menyimpang dengan sengaja dan membuat bisa intervensi negara untuk kepentingan mereka sendiri (Harvey, 2007).

Dalam kelahirannya, neoliberalisme bertujuan untuk mengurangi intervensi dari pemerintah dan mendorong terwujudnya perekonomian melalui mekanisme pasar yang alami. Neoliberalisme yang juga dikenal sebagai ideologi mempunyai arti liberalisme baru. Liberalisme dalam benua Eropa sebagai lawan Amerika Utara berarti ekonomi pasar bebas (Chairman, 2007). Neoliberalisme adalah sebuah aliran dengan misi khusus, yaitu mengurangi campur tangan negara dalam ekonomi untuk diganti dengan pasar. Yang dimaksud dengan neoliberalisme, pasar dijadikan sebagai satu-satunya cara atau sistem untuk mengatur perekonomian dan sekaligus satu-satunya tolok ukur untuk menilai keberhasilan semua kebijakan pemerintah (Deliarnov, 2006). Setiap masalah yang muncul diduga akibat monopoli alami terutama di pasar tenaga kerja, yang mencegah pergerakan bebas harga dan upah serta menarik pasokan dan permintaan bersama-sama. Intervensi negara dipandang mendistorsi ekonomi dan harus dibatasi untuk membela hak milik pribadi dalam pertahanan nasional. Untuk lebih lanjut intervensi negara dalam monetaris di neoliberalisme adalah terlalu mengawasi jumlah uang beredar.

Pada artikel ini, aliran tentang neoliberalisme akan dibahas dan dikupas secara kepustakaan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan informasi mengenai aliran neoliberalisme secara utuh dan mendalam. Pembahasan akan dimulai dengan sejarah neoliberalisme, pengertian neoliberalisme, sifat neoliberalisme dan dampak neoliberalisme.



METODOLOGI

Artikel ini membahas tentang aliran neoliberalisme dan dasar pengetahuan mengenai neoliberalisme. Artikel ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Dalam penelitian kepustakaan, data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang dipakai dalam artikel adalah berupa artikel-artikel ilmiah, buku dan literatur lainnya mengenai neoliberalisme. Artikel ini akan melakukan sintesa mengenai pengetahuan dan informasi mengenai neoliberalisme dengan mengupas sejarah, pengertian, sifat dan dampak dari neoliberalisme.

HASIL DAN DISKUSI

A. Sejarah Neoliberalisme

Ideologi neoliberalisme didukung oleh teori ekonomi neoklasik untuk menunjukkan secara matematis pasar bebas selalu jelas (Chairman, 2007). Maksudnya adalah semua tenaga kerja akan dipekerjakan untuk memproduksi barang-barang yang semua terjual. Ekonomi liberalisme yang merupakan versi lama neoliberalis muncul sebagai ideologi pada akhir Perang Dunia Kedua. Bahkan, sudah mulai digantikan sebagai praktek pada awal abad ke-20, ketika, seperti Rudolf Hilferding, Nikolai Bukharin dan Lenin menunjukkan kapitalisme pasar bebas memberi jalan kepada kapitalisme monopoli dan imperialisme sebagai produknya (Chairman, 2007). Intervensi negara dipandang perlu untuk menyediakan infrastruktur untuk produksi kapitalis. Jerman, Jepang, Inggris dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa intervensi negara bisa memberikan dasar untuk profitabilitas baru dan akumulasi.

Dengan begitu, aliran baru muncul dengan memberitakan intervensi negara sebagai cara untuk melindungi kapitalisme terhadap dirinya sendiri. Aliran baru berdasarkan pada ide-ide dari ekonom Inggris John Maynard Keynes, yang pada tahun 1930-an yang merevisi sebagian gagasan neoklasik yang sebelumnya dia didukung (Chairman, 2007). Setelah Perang Dunia Kedua, modal mengadopsi ide-ide Keynesian karena percaya bahwa berbagai pembatasan dan peraturan akan bermanfaat bagi proses akumulasi modal pada saat historis, terutama dibandingkan dengan catatan buruk akumulasi yang disajikan berdasar pengalaman tanpa pembatasan selama Depresi Besar.

Friedrich von Hayek dan Milton Friedman terus berpegang pada doktrin lama. Bahkan Campbell mengklaim bahwa modal keuangan yang paling tidak pernah menerima kompromi Keynesian (Chairman, 2007). Pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar menerima ideologi Keynesian, bukan karena itu dipaksakan dengan kekuatan kelas pekerja, tetapi karena peningkatan kegiatan ekonomi oleh negara didampingi oleh tingkat jauh lebih tinggi dari keuntungan di AS dan negara-negara besar Eropa di bawah ideologi pra-perang liberalisme ekonomi. Keynesianisme sebagai ideologi mencerminkan realitas kapitalisme pada periode setelah Perang Dunia Kedua. Keynesian sebagai praktek ekonomi, bukan



ideologi, tidak diuji sampai krisis ekonomi yang serius pertama dalam 40 tahun meletus pada pertengahan 1970-an - dan itu terbukti tidak mampu menyelesaikan masalah krisis. Kapitalis dihadapkan dengan kombinasi resesi dan kenaikan harga dikenal sebagai stagflasi. Para Keynesian, salah satunya adalah Francis Cripps, mengatakan bahwa tidak ada yang benar-benar memahami cara kerja ekonomi modern (Chairman, 2007).

Kebangkitan kembali liberalisme klasik dapat dilihat melalui pemikiran dua pemenang nobel Friedrich von Hayek (1899 - 1992) dan Milton Friedman (1912 - 2006) (<http://id.wikipedia.org/wiki/Neoliberalisme>). Upaya pengembalian pemikiran liberalisme klasik tidak hanya pada tataran ide tetapi gagasan tersebut kemudian tertuang dalam kebijakan-kebijakan ekonomi politik domestik di Inggris di bawah perdana menteri Margaret Thatcher dan pada saat yang hampir bersamaan diterapkan oleh Ronald Reagan di Amerika. Dengan demikian, kemunculan neoliberalisme seringkali dikaitkan dengan neokonservatisme mengingat kebangkitannya di Inggris melekat pada Thatcher yang berasal dari partai konservatif. Melalui sponsor oleh Inggris dan Amerika, gagasan neoliberalisme di tingkat global juga menjadi landasan dalam diplomasi ekonomi internasional yang tercermin dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh lembaga-lembaga ekonomi internasional seperti IMF, WTO, dan Bank Dunia (Chairman, 2007).

Krisis struktural kapitalisme memperlihatkan bahwa kebijakan, praktik dan lembaga yang telah melayani dengan baik tujuan kapitalisme akumulasi modal tidak dapat dilakukan lagi. Kapitalisme meninggalkan kompromi Keynesian dalam menghadapi turunnya tingkat keuntungan dan berganti keyakinan bahwa neoliberalisme dapat meningkatkan laba dan akumulasi kinerja (Chairman, 2007). Pada tahap pertama kelahiran kembali ini ide-ide lama berupa monetarisme Milton Friedman sebagai tokoh sentral dalam monetarisme. Friedman mengatakan bahwa ada masalah dengan sistem pasar bebas yang disebabkan oleh ketidakmampuan kontrol pemerintah akan pasokan uang (Chairman, 2007). Akan tetapi versi ekonomi pasar bebas juga terbukti tidak bisa dijalankan dalam waktu kurang dari satu dekade. Sehingga penekanan bergeser ke versi seperti yang von Hayek dan Robert Lucas yang bahkan lebih penting dari intervensi negara dari Friedman. Pendekatan lahirnya kembali pasar bebas yang disajikan oleh Friedman dan Hayek tampaknya menawarkan jalan keluar. Friedman dan Hayek mengklaim bahwa perekonomian akan menyelesaikan masalah sendiri jika dibebaskan dari distorsi pasar yang berasal dari intervensi negara atau intervensi dari *labor union* terhadap fleksibilitas dari pasar tenaga kerja (Chairman, 2007). Perdagangan bebas akan mencegah monopoli nasional mendistorsi harga dan pengangguran akan menetap di *natural rate* yang diperlukan untuk mencegah upah mengerus keuntungan.



2. Pengertian Neoliberalisme

Neoliberalisme mempunyai beberapa pengertian dari berbagai pendapat. Dari beberapa definisi, pada intinya gagasan neoliberalisme berakar pada tradisi pemikiran liberal yang menempatkan individualisme, rasionalitas, kebebasan, dan *equality* sebagai nilai-nilai yang paling mendasar (Winanti, 2011). Neoliberalisme dapat didefinisikan sebagai versi terbaru dari ekonomi politik klasik yang dikembangkan dalam penjelasan dan tulisan para ahli ekonomi pendukung *free market* (Heywood, 2002). Neoliberalisme juga dimaknai sebagai pandangan yang mendukung kembalinya ekonomi politik yang disarankan oleh ekonomi liberal seperti Adam Smith dan David Ricardo, dimana neoliberalisme menekankan deregulasi pasar, privatisasi dari perusahaan milik negara, intervensi pemerintah yang minimum dan terbukanya pasar internasional (Balaam dan Veseth, 2005). Akan tetapi tidak seperti liberalisme klasik, neoliberalisme utamanya adalah agenda kebijakan ekonomi daripada pandangan ekonomi politik..

Neoliberalisme merupakan gagasan yang terkait dengan upaya untuk kembali pada kebijakan ekonomi liberal klasik yang diusung oleh Adam Smith dan David Ricardo. Oleh karena itu, neoliberalisme mempunyai ciri khas gagasan yang lebih menekankan pada deregulasi pasar, privatisasi badan usaha milik negara, campur tangan pemerintah yang terbatas, serta pasar internasional yang lebih terbuka. Akan tetapi, neoliberalisme berbeda dengan liberalisme klasik yang diperkenalkan oleh Adam Smith dan David Ricardo. Neoliberalisme lebih merupakan kebijakan ekonomi daripada sekedar sebuah perspektif ekonomi politik. Neoliberalisme yang juga dikenal sebagai paham ekonomi neoliberal mengacu pada filosofi ekonomi politik akhir abad ke 20 (Winanti, 2011). Neoliberalisme merupakan redefinisi dan kelanjutan dari liberalisme klasik yang dipengaruhi oleh teori perekonomian neoklasik. Neoliberalisme dipengaruhi oleh teori neoklasik dalam mengurangi atau menolak penghambatan oleh pemerintah dalam ekonomi domestik karena akan mengarah pada penciptaan distorsi dan *High Cost Economy* yang berkemungkinan pada tindakan koruptif (Winanti, 2011). Karakteristik umum dari neoliberalisme adalah keinginan untuk memperkuat dan memperluas pasar dengan meningkatkan jumlah, frekuensi, pengulangan dan formalisasi transaksi (<http://web.inter.nl.net/users/Paul.Treanor/neoliberalism.html>). Tujuan akhir dari neoliberalisme adalah dunia dimana setiap aksi manusia merupakan transaksi pasar yang dilakukan dalam kompetisi dengan manusia lainnya dan mempengaruhi setiap transaksi lain, dengan transaksi yang terjadi dalam jangka waktu pendek dan berulang pada tingkat yang cepat. Neoliberalisme bukan hanya sekedar struktur ekonomi tetapi merupakan filosofi. Neoliberalisme merupakan perilaku yang paling masuk akal dan nyata kepada komunitas, individu dan tenaga kerja. Neoliberal cenderung untuk melihat dunia dalam metafora pasar (<http://web.inter.nl.net/users/Paul.Treanor/neoliberalism.html>).



3. Sifat Neoliberalisme

Proses dari neoliberalisme mempunyai banyak *creative destruction* yang tidak hanya pada kerangka institusional sebelumnya dan kekuatan tetapi juga pembagian tenaga kerja, hubungan sosial, kesejahteraan, kombinasi teknologi, cara hidup, pemikiran, aktivitas reproduktif, semua yang ada di tanah dan kebiasaan hati (Harvey, 2007). Bahkan neoliberalisme dapat menantang bentuk tradisional dari kedaulatan negara. Nilai pasar liberalisme sejauh ini telah berubah menjadi etnik dengan sendirinya dimana mampu untuk bertindak sebagai pedoman bagi aksi manusia dan mengganti semua yang pernah dipercaya sebagai kepercayaan etika. Selanjutnya, neoliberalisme juga menekankan pada signifikansi dari hubungan kontraktual dalam lingkungan pasar. Neoliberalisme percaya bahwa barang sosial akan dimaksimalkan dengan memaksimalkan jangkauan dan frekuensi transaksi pasar. Dengan begitu, neoliberalisme akan membawa aksi manusia ke dalam wewenang pasar. Hal tersebut membutuhkan kreasi informasi dalam teknologi dan kapasitas untuk mengakumulasi, menyimpan, mentransfer, menganalisa dan menggunakan database yang besar untuk menuntun keputusan dalam lingkungan pasar global. Oleh karena itu, kepentingan neoliberalisme dalam mencapai teknologi informasi kuat sehingga ini berkembang menjadi tipe baru dari *information society* (Harvey, 2007). Teknologi telah meningkatkan kepadatan dari transaksi pasar dalam ruang dan waktu (Harvey, 2007). Teknologi telah menghasilkan *time space compression*. Semakin besar jangkauan geografis atau globalisasi, semakin pendek kontrak pasar lebih baik. Menurut Lyotard, kontrak temporer menggantikan institusi permanen dalam profesional, emosi, jenis kelamin, budayam keluarga dan wewenang internasional sampai dengan masalah politik (Harvey, 2007). Kondisi ini yang disebut kondisi postmodern dimana konsekuensi budaya atas dominasi etika pasar banyak sekali.

Teori neoliberalisme juga menyatakan *free market* dan *free trade* dalam fundamental *free market* merupakan ukuran yang diperlukan dan berguna untuk penciptaan kesejahteraan dan perbaikan populasi secara luas. Asumsi kebebasan individu yang dijamin dengan kebebasan pasar dan perdagangan merupakan bentuk utama dari pemikiran neoliberalisme (Harvey, 2007). Kebebasan yang diciptakan tercermin dalam kepentingan pemilik properti pribadi, bisnis, perusahaan multinasional dan modal finansial. Negara yang mempunyai misi fundamental dalam memfasilitasi kondisi untuk akumulasi modal yang menguntungkan baik modal domestik dan luar negeri yang disebut dengan negara neoliberal (Harvey, 2007)

Proyek neoliberal membebaskan hambatan-hambatan dari modal yang ada dalam ekonomi liberalisme. Neoliberalisme membebaskan dari hambatan politik dan sosial dari lingkungan regulasi di strategi ekonomi dan industri seperti kepemilikan di faktor kunci-kunci. Neoliberalisme dianggap sebagai jawaban atas



perbaiki ekonomi dengan aliran liberalisme yang mengalami kemunduran dengan rendahnya pertumbuhan yang diikuti dengan tingginya tingkat pengangguran dan inflasi sehingga mengarah kepada keadaan stagflasi. Pada akhir tahun 1960an, liberalisme mulai mengalami kemunduran baik internasional maupun domestik dengan tanda krisis yang serius dari akumulasi kapital dan krisis fiskal yang mengakibatkan pendapatan pajak menurun tajam dan pengeluaran sosial meroket serta emas yang tidak dapat lagi dijadikan basis internasional dan adanya berlakunya *floating exchange rate* (Harvey, 2007). Dunia kapitalis bergerak ke arah neoliberalisme sebagai jawaban atas putaran dan pengalaman yang kacau balau dengan munculnya sebagai aliran baru yang dikenal melalui *washington consensus* pada era tahun 1990 (Harvey, 2007).

Neoliberalisme sebagai ajaran potensial merupakan ancaman bagi penganut kapitalis sosial dan solusi bagi penyakit kapitalisme yang telah bersembunyi di kebijakan publik. Istilah neoliberal diberikan untuk mengisyaratkan bahwa neoliberal masih menganut prinsip *free market* dari ekonomi neoklasik yang diperkenalkan oleh Alfred Marshall, William Stanley Jevons, dan Leon Walras untuk menggantikan teori klasik yang diperkenalkan oleh Adam Smith, David Ricardo, dan Karl Marx (Harvey, 2007). Selanjutnya, neoliberalisme juga masih memandang bahwa *the hidden hand of the market* yang dikemukakan oleh Adam Smith merupakan alat terbaik untuk memobilisasi dasar dari insting manusia seperti kerakusan, keserakahan dan keinginan untuk kesejahteraan dan kekuasaan yang memberikan manfaat bagi semua (Harvey, 2007). Oleh karena itu, doktrin neoliberalisme menolak teori intervensi negara John Maynard Keyes yang muncul pada tahun 1930an dan lebih menolak teori perencanaan pusat negara yang dikemukakan Oscar Lange yang bekerja dengan tradisi Marxist (Harvey, 2007). Neoliberalisme menganggap bahwa keputusan negara terikat pada bias politik sehingga akan tergantung kepada kekuatan kelompok yang berkepentingan. Sebagai tambahan, keputusan di tangan negara dalam investasi dan akumulasi modal bisa mendapatkan informasi yang salah karena informasi yang tersedia bagi negara tidak dapat mencakup semua yang tersirat dari signal pasar (Harvey, 2007).

4. Dampak Neoliberalisme

Misi khusus ajaran Neoliberalisme adalah mengurangi campur tangan negara dalam ekonomi untuk kemudian digantikan oleh pasar, dan pasar dijadikan sebagai satu-satunya cara atau sistem untuk mengatur perekonomian dan sekaligus satu-satunya tolok ukur untuk menilai keberhasilan semua kebijakan pemerintah (Deliarnov, 2006). Sebagai implikasi ajaran Neoliberalisme, masyarakat dan negara hanyalah instrumen yang diperlukan untuk menjamin terjadinya proses akumulasi kekayaan oleh anggota-anggota dalam masyarakat (Winanti, 2011). Dengan demikian, sesuai ajaran neoliberalisme yang antinegara



ini bahwa peran negara harus minimum dan digantikan oleh individu-individu swasta.

Dalam neoliberalisme, pasar, deregulasi, debirokratisasi, privatisasi, dan pengurangan program-program kesejahteraan dan subsidi dijadikan sebagai mantra untuk mengatasi berbagai masalah sosial-ekonomi sekaligus untuk mengejar pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pada intinya, neoliberalisme menginginkan pemerintah disingkirkan dari segala urusan ekonomi dan menyerahkan urusan tersebut pada pasar (Deliarnov, 2006). Neoliberalisme secara umum berkaitan dengan tekanan politik multilateral, melalui seperti WTO dan Bank Dunia. Ini mengakibatkan berkurangnya secara signifikan wewenang pemerintah. Neoliberalisme melalui ekonomi pasar bebas berhasil menekan intervensi pemerintah seperti paham Keynesianisme dan melangkah dalam pertumbuhan ekonomi keseluruhan. Untuk meningkatkan efisiensi perusahaan bisnis negara, neoliberalisme berusaha keras untuk menolak atau mengurangi kebijakan hak-hak buruh seperti upah minimum, dan hak-hak daya tawar kolektif lainnya. Oleh sebab itu, bagi negara-negara yang mengadopsi ajaran Neoliberalisme akan membawa konsekuensi sebagai berikut (Deliarnov, 2006):

- a) Semakin dikurangnya campur tangan pemerintah dalam perekonomian melalui program deregulasi dan debirokratisasi.

Dampak pertama dari neoliberalisme adalah mengurangi atau meminimumkan intervensi pemerintah. Menurut neoliberalisme, semakin besarnya campur tangan pemerintah dalam perekonomian menyebabkan semakin lambatnya pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang bersangkutan. Hal itu merupakan pendapat dari para pakar pendukung neoliberalisme seperti Anne O Kruger, Bela Balasa dan Jagdish Bhagwati. Oleh karena itu, negara-negara berkembang perlu didesak untuk mengurangi campur tangan pemerintah dengan melaksanakan deregulasi dan debirokratisasi. Indonesia dan beberapa negara berkembang merupakan negara yang agresif dalam menerapkan ajaran Neoliberalisme untuk melakukan deregulasi dan debirokratisasi. Indonesia langsung melancarkan deregulasi dan liberalisasi sesudah hancurnya masa keemasan minyak bumi tahun 1982. Deregulasi yang dilakukan tanpa filter ini, terutama dalam perbankan dan moneter terbukti sangat riskan. Menurut Stiglitz (2002), negara-negara berkembang yang kecil seperti kapal kecil. Liberalisasi pasar modal yang pesat didorong oleh IMF. Ibaratnya mendorong perahu kecil untuk berlayar ke laut sebelum lubang di lambung kapal diperbaiki dan kapten belum menerima pelatihan serta sebelum baju pelampung ditaruh di kapal. Kebijakan deregulasi yang disarankan oleh Bank Dunia dan IMF lebih banyak diterapkan dalam gerak modal dan uang, tidak dalam gerak buruh dan tenaga kerja.



Pada banyak kasus, negara-negara maju justru menuntut pemerintah di negara-negara berkembang untuk lebih ketat mengontrol buruh. Hal yang dilakukan oleh para investor asing untuk mengontrol buruh agar selalu bekerja keras tanpa banyak tuntutan adalah menekan pemerintah bahwa para investor asing akan menarik investasinya dari negara tersebut. Para investor asing sebagai pemilik modal dengan tekanan bahwa akan membawa modal keluar dari negara tersebut dapat dengan mudah menolak tuntutan buruh, menghindari peraturan pemerintah setempat, atau meminta insentif dan fasilitas yang lebih menguntungkan pihak investor. Hal tersebut tidak pernah mendapat kritikan dari IMF dan Bank Dunia sebagai lembaga keuangan internasional. Oleh karena itu, Stiglitz (2002) mengatakan bahwa badan-badan internasional seperti IMF dan Bank Dunia tidak mengambil berat atau perhatian pada nasib kaum buruh. Sekeras pekerja atau buruh berjuang untuk pekerjaan yang baik, IMF berjuang secara halus tentang fleksibilitas pasar tenaga kerja dimana terkesan seperti membuat pasar tenaga kerja mempunyai mekanisme yang lebih baik dengan upah rendah dan kurangnya proteksi bagi pekerja. Proyek deregulasi yang dibuat oleh kaum Neoliberalisme sesungguhnya lebih banyak berisi deregulasi pada jangkauan kekuasaan para pemilik modal dan aset finansial. Deregulasi seperti ini hanya memberikan hak istimewa dan kekuasaan yang sangat besar pada pemilik modal. Dengan bebasnya modal untuk keluar masuk suatu negara, para investor tidak lagi terikat pada berbagai aturan, seperti aturan lokasi produksi, sumber modal, teknologi produksi, partisipasi penduduk setempat, dan sebagainya.

- b) Dihapuskannya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan dipromosikannya privatisasi

Pada dampak kedua, neoliberalisme menyarankan privatisasi bagi BUMN yang dimiliki pemerintah selain mendorong deregulasi dan debirokratisasi. Jika dilihat dari satu sisi, hal ini memang dapat meningkatkan efisiensi. Akan tetapi, kalau privatisasi dijalankan, tidak ada jaminan bahwa kepentingan umum tetap dan dapat dijalankan oleh perusahaan-perusahaan swasta. Dengan demikian, sektor-sektor penting yang harusnya dikontrol oleh pemerintah menjadi sulit dilakukan dan negara itu harus menyerahkan sepenuhnya nasibnya kepada mekanisme pasar yang tidak dapat dikendalikan atau dikendalikan oleh para pemilik modal besar. Privatisasi adalah sebuah konsep yang netral, bisa mendatangkan kebaikan dan bisa pula menimbulkan kerugian.

Pada tahap awal, privatisasi memang bisa meningkatkan efisiensi BUMN yang mempunyai kinerja yang rendah. Namun, pada suatu saat privatisasi bisa membawa dampak buruk kalau sesudah berada di tangan



swasta tidak lagi memperhatikan kepentingan umum. Pada kebanyakan negara, BUMN memang banyak yang dijadikan wadah untuk menghasilkan uang oleh para elit politik, baik sipil maupun militer. Di lain sisi, banyak juga BUMN yang dikelola dengan baik. BUMN yang baik dan menyangkut kesejahteraan orang banyak sehingga tidak memerlukan langkah privatisasi.

- c) Dihapuskan atau dikurangnya program-program bantuan pemerintah dan pajak.

Dampak ketiga selain menganjurkan deregulasi, debirokratisasi serta privatisasi adalah penghapusan program bantuan pemerintah. Aliran Neoliberalisme juga menginginkan pemerintah untuk mengurangi program-program kesejahteraan yang dianggap sering menimbulkan inefisiensi dan mendistorsi pasar. Pakar ekonomi politik Neoliberalisme tidak sepenuhnya keliru mengkritik program-program kesejahteraan yang tidak efisien karena hal tersebut dapat menimbulkan ketergantungan yang menyebabkan orang malas berusaha mencari solusi atas masalahnya sendiri. Uluran tangan pemerintah selalu tersedia ketika masalah ada dihadapan mereka. Itu yang membuat terjadinya ketergantungan. Sehingga pada akhirnya ketergantungan akan melemahkan etos kerja. Hal itu akan berdampak kepada pencapaian hasil yang tidak optimal dalam upaya memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Baswir (2003), alasan untuk memberhentikan program-program kesejahteraan karena inefisiensi sangat keliru. Penanganan masalah sosial dilakukan akan kemiskinan dibatasi dengan konsep dan sarat dengan keterbatasan operasional. Dengan begitu, sistem keadilan sosial yang ada bukan dibangun oleh pemerintah, tetapi justru diberikan ke institusi yang bekerja dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba dari kegiatan tersebut. kemungkinan yang akan muncul adalah ketika masa kerja lembaga donor selesai maka program-program kesejahteraan itupun menjadi terhenti.

Dalam Neoliberalisme, peran negara dikehendaki harus sekecil mungkin. Akan tetapi ada kecenderungan dalam era globalisasi ini, peran pemerintah justru semakin diperlukan sebagai regulator dan penyeimbang dalam kegiatan ekonomi negara (Deliarnov, 2006). Para pelaku bisnis, baik domestik dan internasional seharusnya mematuhi regulasi dan aturan-aturan yang jelas. Regulasi dan aturan yang jelas diperlukan agar sistem perekonomian berjalan dengan baik. Dengan demikian, tuntutan atas pemerintahan yang bersih dan jujur semakin meningkat. Pada masa ini, citra tentang pemerintah yang kuat dan efektif tidak lagi diukur dari kemampuannya dalam melakukan intimidasi, melainkan pada kredibilitas



dan kewibawaan pemerintah dalam membuat sekaligus menegakkan hukum dan aturan yang berkeadilan, memberantas korupsi nepotisme dan kolusi, memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, menegakkan demokratisasi, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia ekonomi dan bisnis (Deliarnov, 2006).

REFERENSI

- Balaam, David N. dan Michael Veseth, 2005, *Introduction to International Political Economy*, 3rd edtion, Pearson Education Inc., New Jersey.
- Chairman, Chris, 2007, *Theorising neoliberalism*, journal of Socialist Theory, [Issue: 117](#), 18 December, <http://www.isj.org.uk/index.php?id=399&issue=117>, 14 Oktober 2013
- Deliarnov, M.Sc, Drs, 2006, *Ekonomi Politik*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Harvey, David, 2007, *A Brief History of Neoliberalism*, Oxford University Press, New York.
- Heywood, Andrew, 2002, *Politics*, 2nd edition, Palgrave, New York.
- Neoliberalism: origins, theory, definition*, <http://web.inter.nl.net/users/Paul.Treanor/neoliberalism.html>, 14 Oktober 2013.
- Neoliberalisme*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Neoliberalisme>, 18 Oktober 2013
- Winanti, Poppy S, 2011, *Asal Usul Neoliberalisme*, <http://poppysw.staff.ugm.ac.id/posts/articles/melacak-asalusul-neoliberalisme/>, 18 Oktober 2013.